

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh (Sufni, 2024) yang berjudul Analisis Keberhasilan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada penilaian efektivitas program dalam memperluas kesempatan pendidikan di seluruh Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta temuan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KIP telah berhasil meningkatkan akses pendidikan, dengan adanya peningkatan yang signifikan dalam angka partisipasi kasar (APK) di semua jenjang pendidikan sejak diluncurkannya program ini. Penelitian ini juga menyoroti perlunya mengatasi beberapa tantangan untuk meningkatkan efisiensi program dan memastikan bantuan sampai kepada penerima yang tepat. Sementara itu penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan pendekatan studi kasus dan tidak menjelaskan cara mengatasi tantangan.

Penelitian (Yosevina, 2022) yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar di SMK Negeri Se-Kota Surakarta. Penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi: 1) efektivitas program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di seluruh Kota Surakarta; 2) tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan KIP; dan 3) solusi yang diberikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, dengan mengumpulkan data dari informan, dokumen, dan peristiwa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling, dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen. Validitas data dijamin melalui triangulasi teknik dan sumber, sementara analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif. Temuan penelitian ini mengungkapkan hal-hal berikut: Efektivitas pemanfaatan KIP terlihat pada: 1) Akurasi distribusi target KIP, yang belum sepenuhnya tepat, karena beberapa siswa yang memenuhi syarat belum menerima bantuan, meskipun dana yang disalurkan telah digunakan dengan tepat; 2) Sosialisasi penggunaan KIP, di mana upaya dari dinas pendidikan terbatas hanya pada pemantauan tahunan, sementara sekolah telah melakukan sosialisasi program dengan baik kepada siswa; dan 3) Pemantauan penggunaan KIP, yang telah dilakukan oleh sekolah melalui grup WhatsApp. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu obyek yang diteliti adalah siswa SMK Negeri Se-Kota Surakarta. Selain itu metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Penelitian yang dilakukan (Amroni et al., 2023) yang berjudul Efektivitas Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Terhadap Motivasi Peserta Didik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Kota Bandung. Kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,41% di Indonesia menjadi tantangan besar bagi pemerintah, terutama dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Kondisi pendidikan bagi masyarakat kelas menengah

ke bawah memerlukan perhatian yang cukup besar, menekankan pentingnya penyediaan pendidikan yang inklusif dan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Bantuan finansial yang ditujukan untuk pendidikan bertujuan untuk mengurangi biaya langsung maupun tidak langsung, yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas program KIP (Kartu Indonesia Pintar) dalam meningkatkan motivasi siswa di 40 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Bandung. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan dari 23 responden melalui wawancara dan kuesioner. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi sederhana dengan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program KIP adalah 67,5%, yang menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap motivasi siswa di sekolah-sekolah tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan metode kuantitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hafrienda et al., 2023) yang berjudul Efektivitas Program Indonesia Pintar Pada Jenjang SMA Negeri di Kota Bukittinggi. Penelitian ini didorong oleh adanya kesenjangan yang terlihat antara jumlah siswa yang menerima beasiswa dari Program Indonesia Pintar (PIP) dan jumlah total siswa yang terdaftar di sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai seberapa efektif program ini di Kota Bukittinggi melalui pendekatan kualitatif. Dengan melakukan wawancara, observasi, dan kajian dokumen di sekolah menengah atas di Bukittinggi, penelitian ini mengungkapkan masalah-masalah yang terkait

dengan pelaksanaan program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Indonesia Pintar telah dilaksanakan dengan sukses di Bukittinggi, karena para pelaksana program memiliki pemahaman yang baik mengenai tujuan program tersebut. Selain itu, program ini telah berhasil mendukung siswa dari latar belakang kurang mampu, memberikan manfaat yang berharga bagi masyarakat, dan membantu mengurangi angka putus sekolah di kota tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu obyek penelitian ini adalah siswa SMA Cabang Pendidikan Wilayah I Sumatera Barat.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Juli et al., 2020) yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan Di SMA Negeri 1 Tanjungbalai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Tanjungbalai. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini fokus pada isu-isu terkini dengan mengamati fakta-fakta yang dapat terlihat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KIP di sekolah ini menghadapi tantangan, karena banyak siswa yang belum menerima Kartu Indonesia Pintar, yang membatasi kemampuan mereka untuk mengakses dukungan keuangan yang diperuntukkan bagi mereka. Keterlambatan dalam proses distribusi, khususnya dengan bank yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana, telah menyebabkan kemunduran dalam efektivitas program ini. Meskipun demikian, meskipun ada hambatan-hambatan tersebut, program ini tetap

memainkan peran positif dalam mendukung perkembangan pendidikan siswa, membantu mereka mengembangkan potensi dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah obyek penelitian ini merupakan siswa SMA Negeri 1 Tanjungbalai. Teori efektivitas yang digunakan berbeda yaitu diukur dari tercapainya tujuan dan sasaran program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Strategi Pencapaian Program kartu Indonesia Pintar, Ketepatan Waktu Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Tersedianya Sarana dan Prasarana.

Penelitian selanjutnya oleh (Rini et al., 2024) yang berjudul Peran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Dalam Meningkatkan Kesetaraan Pendidikan Tinggi (Studi Kasus Universitas Salakanagara). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dalam mendorong kesetaraan yang lebih besar di pendidikan tinggi di Universitas Salakanagara. Program KIP Kuliah adalah inisiatif beasiswa yang ditujukan kepada mahasiswa dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi manfaat dari program ini, dengan fokus pada dampaknya terhadap pengembangan karakter dan kinerja akademik. Data dikumpulkan melalui survei dan wawancara dengan penerima beasiswa KIP Kuliah di Universitas Salakanagara, dan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis temuan secara mendalam. Hasil penelitian menyoroti bahwa program KIP Kuliah telah memainkan peran kunci dalam mempromosikan kesetaraan di kalangan mahasiswa di Universitas Salakanagara. Program ini

membantu penerima beasiswa mengembangkan kualitas-kualitas penting seperti kepemimpinan, tanggung jawab, dan kemandirian, sambil memberikan motivasi tambahan untuk meraih kesuksesan akademik. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan keuangan yang diberikan oleh program ini telah berdampak positif terhadap kinerja akademik mahasiswa, memungkinkan mereka untuk fokus pada studi tanpa dibebani masalah keuangan. Meskipun program ini sukses, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti proses seleksi yang ketat, kebutuhan akan pemantauan yang efektif, dan pentingnya pengelolaan dana yang tepat. Untuk meningkatkan dampak program ini, penelitian ini merekomendasikan untuk memperluas upaya sosialisasi kepada mahasiswa dan pihak terkait, meningkatkan dukungan mentoring, serta melakukan evaluasi secara rutin untuk memastikan efektivitas program ini dalam jangka panjang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu obyek penelitian ini adalah mahasiswa. Lebih banyak membahas KIP Kuliah.

Penelitian selanjutnya oleh (Setyaningrum et al., 2023) yang berjudul Efektivitas Akses Layanan Pendidikan Melalui Program Indonesia Pintar Peserta Didik Generasi Z. Penelitian ini berfokus pada evaluasi efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) dalam menyediakan akses pendidikan bagi siswa Generasi Z. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini menerapkan kerangka teori dari Kettner, Moroney, dan Martin untuk menilai dampak program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana PIP telah digunakan secara efektif

untuk membantu biaya pendidikan siswa, sesuai dengan peraturan pemerintah. Dana ini mencakup berbagai pengeluaran pendidikan seperti buku tulis, alat tulis, bahan pembelajaran tambahan, uang saku, biaya les, serta biaya sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler (Pramuka) dan intrakurikuler (OSIS). Selain itu, dana ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk meraih kesuksesan yang lebih besar dalam pendidikan mereka. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah obyek penelitian ini lebih banyak membahas tentang penggunaan program KIP untuk pendidikan gen Z.

Penelitian selanjutnya oleh (Mandasari, 2024) yang berjudul Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) Di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis sejauh mana efektivitas pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Dasar Negeri, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan yang terlibat dalam penelitian ini antara lain Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Raja, Kepala Sekolah Dasar Negeri di kecamatan tersebut, orang tua/wali siswa yang menerima manfaat Program Indonesia Pintar, serta siswa yang menjadi peserta program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Indonesia Pintar di SD Negeri Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dapat dikatakan cukup efektif, berdasarkan beberapa indikator, seperti keakuratan dalam penentuan sasaran program, proses

sosialisasi, tujuan program yang jelas, serta mekanisme pemantauan yang sudah berjalan. Sasaran penerima bantuan Program Indonesia Pintar di SD Negeri Kecamatan Tanjung Raja sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dan sosialisasi program telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku di berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga ke tingkat daerah. Program ini bertujuan untuk membantu biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu yang masih terdaftar di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Meskipun demikian, ditemukan bahwa dana PIP kadang digunakan oleh orang tua/wali siswa untuk keperluan lain di luar pendidikan. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program ini juga telah dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan, oleh pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan sesuai dengan tugas masing-masing. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini dilakukan di di SD Negeri Kecamatan Tanjung Raja. Teori yang digunakan yaitu efektivitas dilihat dari Ketepatan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Tujuan Program dan Pemantauan Program.

Penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan et.al, 2024) yang berjudul Efektivitas Program Bantuan Pendidikan Bagi Anak-Anak Miskin dan Berprestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) dalam memberikan bantuan pendidikan kepada siswa perempuan berprestasi yang kurang mampu di wilayah Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah program ini berhasil meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok yang

kurang beruntung dan bagaimana siswa menggunakan dana yang diberikan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengkaji populasi tertentu, mengumpulkan data melalui pengambilan sampel acak dan analisis statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran informasi tentang program bantuan keuangan telah efektif, karena 247 siswa mengetahui tentang PIP. Namun, dana tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk tujuan pendidikan, dengan 100 siswa menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun program ini sangat penting dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa yang kurang beruntung, masih ada kebutuhan untuk pengelolaan yang lebih baik mengenai bagaimana dana tersebut dialokasikan agar digunakan untuk tujuan pendidikan yang dimaksud. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta.

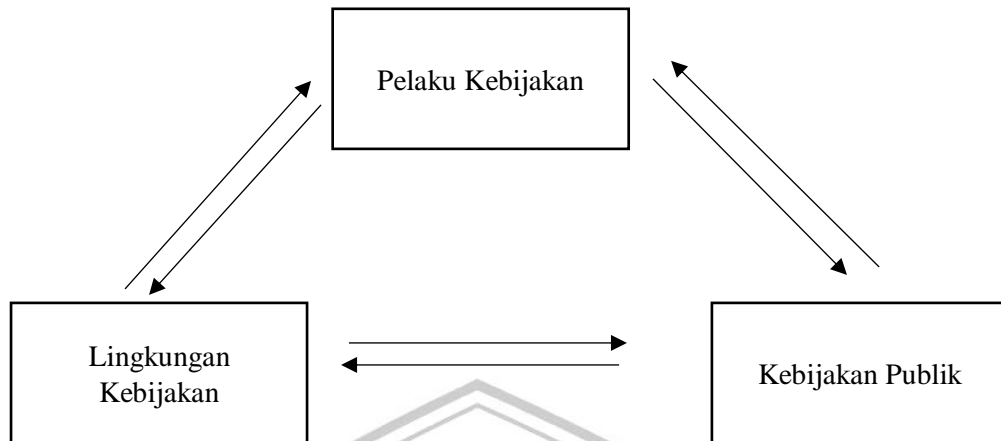
## **B. Kebijakan Publik**

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak menjadi sasaran kebijakan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk mengatur kehidupan bernegara yang dijadikan pedoman guna menyelesaikan masalah yang terjadi dan mencegah timbulnya masalah publik. Islamy (2002) mengatakan pengertian kebijakan negara diatas memiliki implikasi sebagai berikut :

1. Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk Peraturan Daerah nyata berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Bahwa kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata.
3. Bahwa kebijakan negara baik untuk melaksanakan sesuatu atau tindakan melaksanakan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Bahwa kebijakan itu harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan publik yang berkualitas tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para administrator publik, tetapi harus berisi pula opini publik sebagai representasi dari kepentingan publik. Oleh karena itu tugas utama administrator publik mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kepentingan publik, dan untuk itu ia harus memperhatikan terhadap masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan yang ada di lingkungannya.

Administrator publik sebagai pelaku kebijakan merupakan salah satu komponen dari sistem kebijakan publik. Menurut Dunn (1994) "A policy system, or the overall institutional pattern within which policy made, involves interrelationships among three elements : public policies, policy stakeholders, and policy environment". Maksudnya "sistem kebijakan atau pola institusional melalui mana kebijakan dibuat, mengandung tiga elemen yang memiliki hubungan timbal balik: kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 Dunn



**Gambar 2.1 Sistem Kebijakan Publik**

Sumber : (Dunn, 1994)

Pelaku kebijakan (Stakeholders) menurut Dunn terdiri dari pembuat, pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan. Pembuat dan pelaksana kebijakan adalah orang, sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan tertentu dalam kebijakan, sebab mereka berada dalam posisi mempengaruhi baik dalam pembuatan ataupun dalam pelaksanaan dan pengawasan atas perkembangan pelaksanaannya. Sedangkan kelompok sasaran (target group) adalah orang, sekelompok orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan. Kebijakan itu sendiri adalah keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Adapun lingkungan kebijakan adalah keadaan yang melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya sesuatu “isu” (masalah) kebijakan, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, efektivitas suatu kebijakan publik akan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan, kebijakan publiknya itu sendiri (level dan isi), dan lingkungan kebijakan.

Chaizi Nasucha dalam Harbani Pasolong (2008), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. Pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh Friedrich dalam bukunya *Man Has Government* (1963) “a purposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilized and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose”. Pendapat ini mengandung makna bahwa kebijakan merupakan rangkaian usulan dari seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang menunjukkan hambatan dan kesempatan terhadap implementasi usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Wiliam N. Dunn dalam (Harbani Pasolong 2011:29) kebijakan publik adalah suatu rangkaian yang pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah yang menyangkut tugas pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

### **C. Kartu Indonesia Pintar (KIP)**

Program Indonesia Pintar merupakan program beasiswa dan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu. Program Indonesia pintar sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

2014, yang mengamanatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Implementasi PIP merupakan kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sekaligus untuk mendorong implementasi Pendidikan Menengah Universal/ rintisan wajib belajar 12 tahun. PIP menjangkau peserta didik dari jalur pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) dan non formal (SKB/PKBM, Lembaga Kursus dan Pelatihan). Tujuan dari program ini antara lain: meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, menarik peserta didik putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah / Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) / Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) / lembaga kursus dan pelatihan (LKP) / Balai Latihan Kerja (BLK) atau satuan pendidikan non formal lainnya.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar). Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari

kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Penerima Program Indonesia Pintar diprioritaskan kepada anak yang berusia 6 sampai 21 tahun. Persyaratan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada pendidikan formal adalah peserta didik yang terdaftar dalam Dapodik Sekolah dan diusulkan oleh sekolah melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis Kemendikbud. Sasaran penerima Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun 2015 adalah sebanyak 17.920.270 peserta didik dengan jumlah siswa SMK/Kursus dan Pelatihan sebanyak 1.846.538 peserta didik. Besaran dana KIP per peserta didik untuk SMK adalah sebesar Rp1.000.000,- per tahun bagi siswa kelas X dan XI SMK dengan program 3 tahun. Sementara bagi siswa kelas XII mendapatkan dana PIP untuk satu semester sebesar Rp 750.000,-.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan hasil dari Program Indonesia Pintar, kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien: Diusahakan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang singkat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Efektif: Harus sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberi manfaat yang besar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c. Transparan: Menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP.

- d. Akuntabel: Pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Kepatutan: Penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
- f. Manfaat: pelaksanaan program atau kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar melibatkan instansi-instansi terkait antara lain mencakup sekolah, dinas kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, direktorat teknis, lembaga penyalur sebagaimana berikut.

a. Mekanisme Pengusulan

Pengusulan calon penerima PIP menurut Petunjuk Teknis Kemendikbud yaitu siswa dari keluarga pemilik KPS/KKS/KIP untuk sekolah formal mengentri (updating) data siswa calon penerima PIP 2015 ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap. Data berfungsi sebagai data usulan siswa calon penerima dari sekolah ke dinas pendidikan kabupaten/ kota dan direktorat teknis. Dinas pendidikan kabupaten/kota meneruskan usulan calon penerima dari sekolah yang disetujui sebagai usulan ke direktorat teknis. Bagi siswa yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP dari keluarga miskin/rentan miskin dapat diusulkan oleh sekolah setelah seluruh siswa/anak dari keluarga pemilik KPS/KKS/KIP ditetapkan sebagai penerima BSM/PIP 2015. Sekolah menyeleksi dan menyusun daftar siswa yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP sebagai calon penerima dana BSM/PIP 2015 dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Siswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
- b) Siswa dengan status yatim piatu/yatim/piatu dari Pantu Sosial/Pantu

Asuhan; c) Siswa yang terkena dampak bencana alam; d) Anak usia 6-21 tahun yang tidak bersekolah (drop-out) yang diharapkan kembali bersekolah; e) Siswa dari keluarga miskin/ rentan miskin yang terancam putus sekolah; f) siswa/anak dengan pertimbangan khusus lainnya seperti: kelainan fisik, korban musibah, siswa dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara tinggal serumah) Siswa dari SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian (bidang Agrobisnis dan Agroteknologi) Perikanan, Peternakan, kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman. Setelah sekolah menyeleksi sesuai prioritas kemudian mengusulkan sebagai penerima PIP 2015 melalui aplikasi Verifikasi Indonesia Pintar (VIP) yang tersedia di laman dinas pendidikan kabupaten/kota. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyetujui dan selanjutnya meneruskan ke direktorat teknis usulan calon penerima BSM/PIP 2015. Siswa juga dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan ke direktorat teknis sesuai dengan prioritas sasaran dan persyaratan yang ditetapkan, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi data usulan terhadap data pokok pendidikan (Dapodik).

b. Mekanisme Penetapan Penerima

Penetapan penerima Program Indonesia Pintar ditetapkan melalui beberapa tahap diantaranya: a) Direktorat teknis menerima usulan calon siswa penerima PIP dari dinas pendidikan kabupaten/kota; b) Direktorat teknis menetapkan siswa penerima PIP dalam bentuk surat keputusan

(SK) direktur teknis sedangkan untuk usulan SMK yang berada dibawah binaan provinsi, pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

c. Mekanisme Penyaluran

Penyaluran dana BSM/PIP 2015 dilakukan oleh lembaga penyalur berdasarkan daftar penerima BSM/PIP dari Direktorat teknis yang tercantum dalam SK melalui Tabunganku dan virtual account. Direktorat Teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan SK direktur. Setelah itu KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di lembaga penyalur. Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2N) kepada lembaga penyalur untuk menyalurkan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening siswa penerima. Direktorat teknis menginformasikan daftar siswa penerima kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan SK penerima. Penerima PIP dapat mencairkan dana BSM/PIP di lembaga penyalur.

d. Mekanisme Pengambilan Dana

Pencairan dana PIP dilakukan oleh penerima membawa dokumen Surat Keterangan Kepala Sekolah, Foto copy lembar rapor yang berisi biodata lengkap, dan KTP peserta didik. Bagi penerima yang belum memiliki KTP pengambilan dana harus didampingi orang tua dengan menunjukan KTP orang tua. Penerima menandatangani bukti penerimaan dana yang telah disediakan oleh lembaga penyalur. Bagi penerima yang

menggunakan virtual account dan berada di daerah terpencil dapat melakukan pengambilan secara kolektif dengan dikuasakan kepada kepala sekolah atau bendahara.

#### **D. Efektivitas**

Efektivitas yang berasal dari kata efektif adalah suatu cara untuk mengukur sejauhmana program tersebut dapat berjalan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Menurut Mardiasmo dalam Sumenge (2013) “Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna)”. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Menurut Siagian (2003), efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Efektivitas adalah taraf tercapainya satu tujuan yang telah ditetapkan, Salim dalam Molaga (2015) mengatakan bahwa “Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional”. Menurut Gie dalam Budiani (2009) “Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang

dikehendaki sebelumnya”. Sesuai dengan definisi yang sudah dipaparkan beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas ialah adanya hasil dari sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional, jadi dapat dikatakan efektif jika suatu program atau tujuan maupun tugas dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik.

Efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauhmana program tersebut dapat berjalan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Jones dalam Ponto (2016), program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Keefektifan suatu program dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, maka ukuran efektivitas menjadi acuan dalam melakukan analisis suatu kegiatan atau program yang telah terlaksana. Efektivitas suatu program dapat diukur dengan cara menggunakan berbagai indikator berdasarkan konsep dan teori yang ada.

Tercapainya tingkat efektivitas yang tinggi perlu memperhatikan kriteria pengukuran efektivitas adapun menurut Budiani dalam Pratiwi (2017) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut yakni ketepatan sasaran program, pemahaman program dalam hal ini sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Sosialisasi program, kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

Tujuan program, sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan pemantauan program, kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Menurut Sutrisno dalam Jannah (2016) mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran efektivitas program didalam sebuah organisasi, yakni sebagai berikut, pemahaman program, dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program. Tepat sasaran, dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan. Tepat waktu, dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Tercapainya tujuan, diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan. Dan perubahan nyata: diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan yang nyata bagi masyarakat ditempat.

Berdasarkan definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran mengenai keseluruhan proses dan hasil dari pelaksanaan suatu program atau kegiatan, yang dapat memaparkan capaian dari tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai ukuran keberhasilan dan evaluasi suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Peneliti menegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini menggunakan teori Sutrisno dalam Jannah (2016) dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- a. Pemahaman program
- b. Tepat sasaran

- c. Tepat waktu
- d. Tercapainya tujuan
- e. Perubahan nyata

Efektivitas merupakan suatu pencapaian dari kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Efektivitas organisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, Steers (1985) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu:

- a. Karakteristik Organisasi, struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas.
- b. Karakteristik Lingkungan, faktor pengaruh lingkungan dapat dilihat dari dua aspek yaitu lingkungan luar dan lingkungan dalam.
- c. Karakteristik Pekerja, para pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas, jadi harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.
- d. Karakteristik Praktek dan Kebijakan Manajemen, kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi dan harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja

#### **E. Kualitas Pendidikan**

Pendidikan merupakan usaha sadar seseorang dalam meningkatkan kualitas diri dan suatu hal yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa dan negara. Pendidikan diharapkan dapat membentuk karakter, moral, dan perilaku individu untuk menjadi lebih baik. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuh kembangkan potensi bawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat, tanpa pendidikan mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.

Tujuan pendidikan nasional telah dirumuskan melalui Undang-Undang Sisdiknas, ada dua tujuan pendidikan nasional seperti yang tersirat didalam UUD 1945, yaitu:

- a. Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Pendidikan adalah hak seluruh rakyat.

Pendidikan nasional memiliki tujuan yang jelas seperti yang tercantum dalam undang-undang pendidikan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Selaras dengan pendapat Tilaar (2009:6) yang menyatakan bahwa “Tujuan pendidikan nasional dalam rangka ini adalah suatu proses

pemerdekaan manusia Indonesia. sebagai bangsa yang merdeka dia tidak akan hanyut dari arus globalisasi ataupun hanya berpangku tangan dan bersikap masa bodoh terhadap perubahan-perubahan yang besar di dalam kehidupan sehari-hari tetapi merupakan seorang pribadi yang sadar akan identitasnya sebagai bangsa Indonesia”

